



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Peran Atase Polri di Belanda Menghadapi Ancaman Asimetris Periode Tahun 2021-2024

Fibri Karpiananto¹, Lukman Yudho Prakoso², Yudha Rusniwan³.

¹Sesko TNI, Bandung, Indonesia, fibri_atpol@indonesia.nl.

²Sesko TNI, Bandung, Indonesia, email.

³Sesko TNI, Bandung, Indonesia, email.

Corresponding Author: fibri_atpol@indonesia.nl.¹

Abstract: *Asymmetric threats coming from the Netherlands during the 2021-2024 period include the activities of separatist groups that threaten the disintegration of the nation, drug trafficking, terrorism and cyber attacks. The National Police Attaché as an integral part of the National Police serving abroad has the duty and responsibility to carry out police duties in the country of deployment. The research method used in this study uses qualitative descriptions as a research effort to provide an overview of situations/phenomena that occur in the research object according to the conditions as they are, to obtain solutions to generally accepted problems in the form of words and language. The results of this research show that in carrying out the role of the National Police Attaché, an effective approach to dealing with asymmetric threats has not been found, there has not been optimal use of the capabilities of Atpol personnel in carrying out basic tasks in the country of deployment, and there has not been integrated cooperation between agencies stationed in the Netherlands. Therefore, an effective strategy and effort is needed so that the role of the National Police Attaché can be optimal in facing asymmetric threats.*

Keyword: *Regulation, Competency, Strategy and Degree of Strength.*

Abstrak: Ancaman asimetris yang datang dari negara Belanda selama periode tahun 2021-2024, diantaranya melalui aktivitas kelompok-kelompok separatis yang mengancam disintegrasi bangsa, perdagangan narkoba, terorisme dan serangan siber. Atase Polri sebagai salah satu bagian integral Polri yang berdinasi di luar negeri memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas polisionil di negara penempatan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai upaya penelitian untuk memberikan gambaran situasi/fenomena yang terjadi pada objek penelitian sesuai kondisi apa adanya, untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang berlaku umum dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan peran Atase Polri belum menemukan pendekatan efektif mengatasi ancaman asimetris, kemudian belum optimalnya penggunaan kemampuan personel Atpol dalam melaksanakan tugas pokok di negara penempatan, serta belum terpadunya kerjasama antar instansi yang ditempatkan di Belanda. Maka daripada itu, diperlukan suatu strategi dan upaya yang efektif agar peran

Atase Polri dapat optimal dalam menghadapi ancaman asimetris, strategi-strategi tersebut diantaranya melalui peningkatan kemampuan Atase dengan memberikan pembekalan keterampilan negosiasi, public speaking serta kemampuan analisa deteksi dini. Strategi selanjutnya melalui pengembangan penjabaran tugas pokok dan fungsi Atase Polri melalui penggalangan kelompok-kelompok yang mengancam disintegrasi bangsa, serta peningkatan kerjasama dengan unsur-unsur atase instansi lainnya di negara penugasan.

Kata Kunci: Regulasi, Kompetensi, Strategi dan Gelar Kekuatan.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 di zaman kemajuan teknologi saat ini, ancaman terhadap pertahanan negara semakin tajam dan tidak beraturan (Asimetris). Peperangan asimetris (*Asymmetric Warfare*) “merupakan jenis peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra-geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra-ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), tidak hanya datang dari negara/state actor melainkan juga dari pihak lain yang bukan negara/non state actor” (Sesko TNI, 2024). Dalam membangun pertahanan negara, Indonesia menganut paham pertahanan defensif aktif, yaitu pertahanan yang tidak agresif, ekspansif, namun mengedepankan kepentingan nasional, sistem ini diwujudkan dengan mengedepankan diplomasi melalui politik luar negeri yang bebas aktif, maka daripada itu, diperlukan suatu peran Perwakilan Negara di Luar negeri melalui Atase di Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Salah satu Atase pada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri adalah Atase Polri (Atpol) yang keberadaan dan pelaksanaan tugasnya diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 tahun 2020 tentang Atase dan Staf teknis Kepolisian RI pada perwakilan di Luar Negeri, dimana Peraturan Kapolri tersebut diatur bahwa salah satu tugas utama Atase Polri adalah membantu Kantor Perwakilan dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia khususnya dalam memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara penugasan dalam hal ini Kerajaan Belanda. Salah satu kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi perhatian serius di Belanda saat ini adalah adanya ancaman perang asimetris terhadap kedaulatan negara. Ancaman Perang asimetris tersebut salah satunya berasal dari Kelompok insurjensi (separatis) yang masih aktif di Belanda dan menjadikan Belanda sebagai basisnya. Pergerakan kelompok ini di Belanda bertujuan untuk membawa isu dalam negeri ke Dunia internasional dengan dalih internasionalisasi karena Belanda merupakan negara yang menjadi perhatian Internasional dengan adanya Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), beberapa kelompok yang terindikasi melaksanakan pergerakan di negara Belanda diantaranya adalah : Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta adanya hubungan dengan kelompok separatis Aceh Merdeka (*Acheh Sumatra National Liberation Front/ASNLF*) yang berbasis di Denmark. Selain adanya kelompok pro-disintegrasi NKRI di Belanda tersebut, ancaman asimetris lainnya datang dari ancaman transnational crime berupa ancaman terorisme, perdagangan narkoba dan *cyber crime*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Pemerintah Indonesia dengan penggunaan seluruh kekuatan negara khususnya di Belanda telah mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan ancaman asimetris ini. Atase Polri sebagai salah satu perwakilan negara, perlu mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya menjalankan aspek polisionil di negara Belanda, dengan mengedepankan diplomasi terhadap pemerintah Belanda khususnya otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan ini. Salah satu solusi

yang dapat ditempuh adalah berkoordinasi dengan pemerintah Belanda agar tidak terpengaruh terhadap propaganda yang disampaikan oleh kelompok-kelompok insurjensi anti NKRI (ULMWP/OPM, RMS dan ASNLF) dengan menyampaikan kontra narasi berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga pemerintah Belanda tetap mengakui NKRI secara utuh dan berdaulat. Kemudian dari aspek perlindungan masyarakat, Atpol juga dapat meningkatkan peran pembinaan masyarakat khususnya WNI di negara Belanda, sehingga masyarakat lain tidak terpengaruh terhadap kegiatan/aksi-aksi yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok tersebut karena akan menjadi ancaman bagi pertahanan negara. Kemudian Atpol juga dapat menjadi deteksi dini bagi ancaman asimetris dalam pelaksanaan kegiatan ancaman transnational crime yang datang dari Belanda ke Indonesia. Maka daripada itu, penelitian ini akan dielaborasi lebih lanjut mengenai Peran Atase Polri di Belanda guna Menghadapi Perang Asimetris sehingga akan mereduksi dinamika ancaman dan mewujudkan sistem pertahanan negara Indonesia yang lebih kuat.

METODE

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut menurut Moleong (2010, h.6), penelitian kualitatif adalah : “Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Desain penelitian menggunakan deskriptif analisis, menurut Sukmadinata (2017, h.72) “metode deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah, maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya” . Peneliti mencoba memberikan gambaran situasi/fenomena yang terjadi pada objek penelitian sesuai kondisi apa adanya, untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang berlaku umum dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Subjek Penelitian ditentukan melalui teknik *Purposive Sampling* yang dianggap sesuai dalam penelitian kualitatif, dimana menurut Sugiyono, (2017) “teknik *purposive sampling* ditentukan melalui identifikasi ciri-ciri khusus yang telah ditentukan peneliti dan dianggap dapat memberikan informasi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian objek penelitian yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Peran Atase Polri dalam Menghadapi Perang Asimetris Terhadap Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara (Studi Kasus Penugasan Atase Polri di Belanda Tahun 2021-2024). Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data khas penelitian kualitatif yaitu melalui metode wawancara mendalam dengan subjek penelitian, observasi terhadap objek penelitian kemudian studi pustaka melalui pengumpulan data-data dari karya-karya penelitian terdahulu, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen-daokumen sebagai sumber data primer serta pemberitaan di media *opensource* baik online maupun offline.

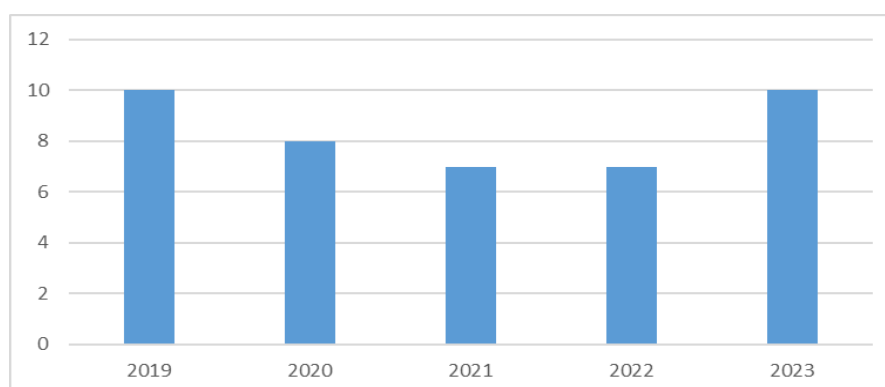
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman asimetris yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional RI dari negara Belanda selama periode tahun 2020-2024, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Ancaman Kelompok Aktivis Republik Maluku Selatan (RMS)
 - 1) Setiap tahun kelompok ini terus melakukan kampanye dan propaganda menuntut kemerdekaan RMS yang diklaim telah diberikan oleh Belanda kepada RMS pada tahun 1950 dan tuduhan pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh pemerintah RI. Setiap tahun kelompok RMS melaksanakan aksi unjuk rasa pada tanggal 25 April (HUT Kemerdekaan RMS), 10 Desember (peringatan hari HAM dunia), dan 17 Agustus (HUT Kemerdekaan RI) di depan Kantor KBRI maupun lokasi peringatan HUT Kemerdekaan RI.

- 2) Aktivitas kelompok RMS masih aktif hingga saat ini, namun tidak terlalu progresif karena minimnya dukungan dari populasi komunitas Maluku-Belanda yang saat ini berjumlah hampir 80.000 orang dan jangkauan diplomasi internasional yang dinilai tidak cukup mendapat atensi komunitas internasional, khususnya negara-negara yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa.
 - 3) Pada 26 Januari 2023, RMS menyampaikan petisi kepada anggota parlemen Sylvana Simons (Partai BIJ1) yang meminta advokasi kepada Pemerintah Belanda untuk menyampaikan permintaan maaf dan langkah perbaikan dari Pemerintah kepada komunitas Maluku serta berdiskusi dengan exiled government RMS. Selanjutnya, Simons menyampaikan concern komunitas Maluku tersebut dalam Debat Komisi terkait Diskriminasi, Rasisme, dan HAM antara Parlemen dengan Pemerintah Belanda.
- b. Kelompok Aktivis *Free West Papua Campaign – Nederland (FWPC-N)*.
- 1) Kelompok ini kerap melakukan propaganda menyerang kedaulatan pemerintah RI melalui jaringan media sosial dengan materi konten tuduhan pelanggaran HAM dari operasi penegakan hukum dan keamanan di wilayah Papua.
 - 2) Setiap tahunnya, kelompok ini melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 1 Juli (peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka), 1 Desember (peringatan HUT Kemerdekaan Papua), dan 10 Desember (peringatan HUT HAM Dunia).
- c. Kelompok separatis Aceh Merdeka (Acheh Sumatra National Liberation Front/ASNLF). Gerakan ini menegaskan karakter internasionalisnya melalui solidaritasnya dengan gerakan pembebasan masyarakat tertindas lainnya di seluruh Dunia.



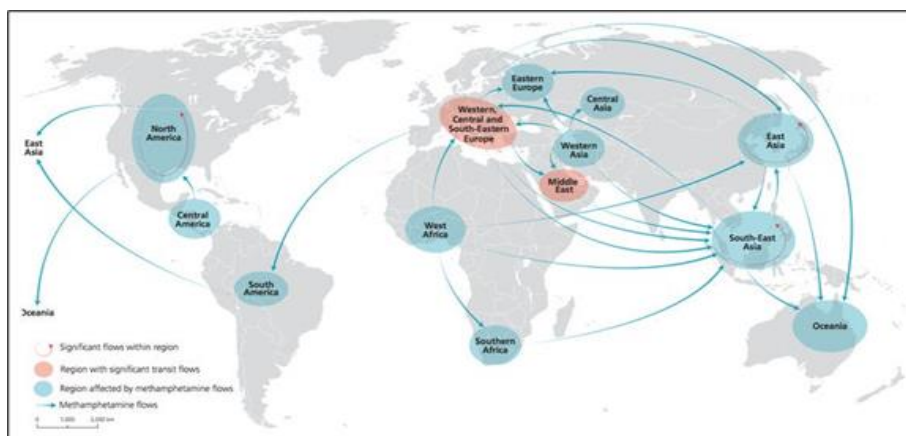
Sumber : Hasil Riset, 2024

Gambar 1. Jumlah Kejadian Demo Kelompok RMS, OPM dan ASNLF di Belanda

Dari gambar 1 tersebut diatas maka dapat diketahui jumlah kejadian Demo/unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok RMS, OPM dan ASNLF di Belanda selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 terjadi sebanyak 10 kali kejadian, tahun

2020 dengan 8 kejadian, tahun 2021 terjadi 7 kali kejadian, tahun 2022 dengan 7 kejadian serta tahun lalu kembali meningkat menjadi 10 kali kejadian.

- d. Terdapat beberapa WNI eks ISIS yang kembali dari Suriah melalui Belanda dan menetap di Belanda untuk mempengaruhi WNI/Diaspora Indonesia yang berada di Belanda untuk menjadi teroris di Indonesia. Pemicu rentannya aksi terorisme di Belanda diantaranya adanya kelompok-kelompok anti-Islam di Belanda.
 - 1) Pada 22 Januari 2023, pimpinan Pegida (kelompok far-right anti-Islam di Belanda), Edwin Wagensveld, melakukan aksi unjuk rasa seorang diri dan melakukan perobekan AI-Qur'an di depan gedung Parlemen Belanda di Den Haag.
 - 2) Pada 12 Februari 2023, Pegida kembali melakukan aksi perobekan AI-Qur'an di Utrecht, yang dihadiri oleh sedikit orang. Pemerintah Kota Utrecht mencegah publikasi/diseminasi informasi mengenai rencana aksi ini guna mencegah bentrokan/kerusuhan, namun tidak dapat melarang aksi karena tidak melanggar hukum positif di Belanda.
 - 3) Pada 15 April 2023, melalui akun Twitter-nya, Wagensveld mengunggah video perobekan AI-Qur'an di depan gedung pertunjukan opera (Stopera) di Amsterdam sebagai reaksi atas proses penyelidikan pidana tersebut.
- e. Serangan *cyber* ke beberapa server milik pemerintah RI atau Swasta di Indonesia dengan IP Address yang berasal dari Belanda.
- f. Belanda sebagai Hub peredaran narkoba jaringan internasional
 - 1) Belanda memiliki pelabuhan terbesar di Eropa, yaitu pelabuhan Rotterdam, yang menghubungkan jaringan perdagangan Eropa dengan perdagangan dari Benua Asia, Afrika, dan Amerika.
 - 2) Sejalan dengan peran pelabuhan Rotterdam sebagai titik hub jalur perdagangan internasional, hal tersebut dimanfaatkan oleh jaringan kelompok sindikat Narkoba internasional yang ingin memasarkan produknya ke seluruh negara di dunia melalui pelabuhan Rotterdam, termasuk ke Indonesia.



Sumber : Pusat Data Atpol RI, 2024

Gambar 2. Arus Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional

Dari gambar 2 tersebut diatas, maka dapat dilihat jalur perdagangan Narkoba Jaringan Internasional, dimana Belanda merupakan wilayah dengan arus transit signifikan pada

perdagangan narkoba, kemudian Indonesia sebagai kawasan terpengaruh cukup signifikan dari peredaran perdagangan Narkoba Dunia.

1. Peran Atase Polri di Belanda dalam Menghadapi Ancaman Asimetris.

Secara terminologi peran dimaknai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang memiliki posisi dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, "peran" disebut "*role*" yang didefinisikan sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Artinya, peran adalah tugas atau kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang dalam pekerjaan atau usaha tertentu, peran merujuk pada perilaku yang diharapkan dari individu dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Menurut Syamsir Torang (2014, p.86) peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Dari pemahaman teori peran tersebut, suatu entitas dalam sebuah negara memiliki perannya masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atase Polri sebagai perwakilan diplomatik negara berperan sesuai tugas institusinya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah penempatan administratif negara lain. Dihadapkan pada tujuan menghadapi peperangan asimetris, peran Atpol sangat strategis dimana karakteristik ancaman asimetris dengan memanfaatkan aspek-aspek keamanan nasional sebagai cara bertindak dalam menghancurkan sebuah bangsa.

Dihadapkan pada ancaman asimetris di Belanda, berbagai ancaman telah datang silih berganti khususnya yang mengancam bangsa Indonesia, dalam hal ini warga negara Indonesia (WNI) dan seluruh premis Indonesia yang ada di Belanda. Sehubungan dengan hal tersebut, Atase Polri bekerjasama dengan Atase Pertahanan dan Tim Keamanan KBRI Den Haag lainnya bersinergi dan bahu-membahu dalam mengantisipasi segala ancaman tersebut. Peran Atase Polri dalam hal ini sangat terasa, dimana Atase Polri juga sangat aktif dalam berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Belanda maupun berbagai pihak yang terkait guna membantu pelaksanaan pengamanan dalam setiap kegiatan yang melibatkan kelompok separatis seperti RMS, OPM dan ASNLF. Kelompok tersebut biasanya aktif melaksanakan aksi demonstrasi maupun propaganda yang mengecam Indonesia maupun membahayakan premis-premis Indonesia yang ada di Belanda. Oleh karena itu dukungan dan bantuan keamanan dari Pemerintah Belanda tentunya juga sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan Dalam Negeri.

Salah satu upaya mengatasi ancaman asimetris di Belanda adalah melalui diplomasi pertahanan, dalam penelitian terdahulu oleh Constantya Astrid Permata Sari (2022) menyatakan diplomasi pertahanan yaitu cara mengelola hubungan internasional dua negara pada masa damai dengan menggunakan angkatan bersenjata dan kementerian atau lembaga terkait bidang pertahanan sebagai sarana untuk mengurangi dan mencegah konflik dengan negara lain, menjalin hubungan dengan musuh potensial serta mempromosikan hubungan sipil-militer guna mencapai kepentingan nasional. Mengacu kepada teori hubungan Internasional, menurut bull dalam Dugis, Visensio (2016, p.6) mengemukakan bahwa teori hubungan internasional meliputi teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia (*world politics*), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri. Teori tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan hubungan internasional memerlukan suatu kaidah/sistem internasional dalam menjalankan suatu diplomasi. Atase Polri dapat mendukung pelaksanaan Diplomasi Pertahanan melalui pelaksanaan isu-isu/substansi yang menjadi bagian dari Diplomasi Pertahanan dalam kerjasamanya dengan mitra kerja di lingkup

otoritas keamanan Belanda. Atase Polri juga dapat menyebarluaskan informasi mengenai capaian dan langkah-langkah penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang telah diambil oleh Pemerintah RI.

Atase Polri selalu bekerjasama dengan baik dan mendukung Atase Pertahanan dalam diplomasi pertahanan di Belanda. Atase Polri bersama-sama dengan Atase Pertahanan juga sering berkesempatan dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi diplomasi pertahanan. Selama ini Atase Polri selalu bekerjasama dengan baik bersama Atase Pertahanan dalam mewujudkan diplomasi pertahanan di Belanda. Atase Polri cukup aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi diplomasi pertahanan bersama-sama dengan Atase. Hal tersebut tentunya didasari oleh prinsip sinergitas TNI-Polri yang aktif dan berkesinambungan, sehingga dapat saling membantu satu sama lain dalam mewujudkan tugas-tugas negara, khususnya di negara Belanda. Hal ini tentunya juga sebagai langkah nyata dan perwujudan sinergitas TNI-Polri, khususnya di negara Belanda. Diplomasi pertahanan dilaksanakan dalam mendukung sistem pertahanan negara, pencegahan dini serta meraih dukungan masyarakat Dunia, sehingga dapat mengeliminir ancaman-ancaman yang datang.

Tantangan diplomasi pertahanan saat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia akibat dari ancaman asimetris yang dilancarkan terhadap Indonesia. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia. Jika kondisi ini terjadi, maka akan muncul celah di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin ‘mendelegitimasi’ pemerintah RI. Contoh nyata adalah upaya kelompok FRWP (*Federal Republic of West Papua*) untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional mengenai eksistensinya sebagai entitas negara. Upaya diseminasi informasi mengenai syarat-syarat negara berdaulat dilakukan secara terencana di Indonesia maupun forum internasional. Berbagai upaya perlu terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui utusan Atase yang berada di Luar Negeri untuk memulihkan kepercayaan publik Internasional, sehingga kepentingan nasional dalam hal pertahanan dan keamanan dapat tercapai.

Atase Polri diberikan kewenangan melakukan penyelidikan awal terjadinya tindak pidana serta pengumpulan informasi/bahan keterangan. Dalam konteks ini Atase Polri memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan kepolisian di luar wilayah hukum RI sesuai dengan sifat dan asas hukum pidana Indonesia serta ketentuan hukum di wilayah penugasan. Begitupun jika Atase Polri melakukan penyelidikan awal dalam konteks menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka proses penanganan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada Mabes Polri sebagai instansi yang akan melakukan proses penyelidikan lanjutan dan jika mungkin penyidikan. Atase Polri hanya dapat memberikan informasi secara lisan maupun tertulis mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya ancaman asimetris berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di wilayah penugasan.

2. Strategi dan Upaya dalam Meningkatkan Peran Atase Polri di Belanda saat ini dalam menghadapi Ancaman Asimetris

Upaya peningkatan peran Atase Polri di Belanda dalam menghadapi ancaman perang asimetris adalah untuk memastikan Keamanan Nasional terlindungi dari berbagai macam ancaman. Dalam konsep keamanan Nasional menurut Barry Buzan (1991) definisi keamanan nasional (*National Security*) diinterpretasikan menjadi beberapa pengertian, dalam pengertian tradisional, keamanan hanya mencakup keamanan yang berkaitan dengan negara dan usaha untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Namun Pasca perang dingin isu keamanan yang berubah dari high politic issues ke low politic issues menjadikan konstelasi tiap negara berbeda-beda dalam menanggapi perubahan tersebut. Studi keamanan modern berfokus kepada aktor non-negara dan ancaman non militer, disebut juga Non-Traditional Security

(NTS). Isu-isu keamanan NTS dilihat sebagai segala bentuk ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat baik kelompok maupun individunya. Salah satu konsep keamanan di era modern adalah konsep keamanan manusia (*human security*) yang merupakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan ancaman yang membahayakan individual tau kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Barry Buzan menegaskan bahwa konsep keamanan mengalami pergeseran isu-isu keamanan tradisional menuju pada isu keamanan non-tradisional terutama pada *people oriented* yang berkembang menjadi multidimensional seperti ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Barry Buzan menyatakan terdapat lima dimensi yang saling terkait, yakni : *military, political, economic, societal dan environmental*. Konsep keamanan modern ini penting untuk dipahami oleh seluruh stakeholder bangsa, dengan memahami konsep keamanan nasional yang komprehensif datang dari luar negeri sehingga dapat dipahami bentuk serta jenis ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, salah satunya adalah ancaman *Non-Traditional Security (NTS)*.

Dalam Konsep keamanan Nasional, tujuan penempatan Atase Polri di negara penugasan adalah untuk meningkatkan dan mempererat kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas Polri. Selain itu, mereka bertugas memberikan perlindungan kepada WNI dengan semangat kebersamaan, berdasarkan prinsip persamaan dan saling menghormati. Atase Polri juga berperan sebagai Perwira Penghubung Polri (LO) di lembaga terkait, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperlancar kerja sama sesuai kepentingan tugas kepolisian. Mereka juga melakukan koordinasi antar organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya atau jasa dari kedua belah pihak. Menanggapi tantangan ini, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat beberapa pasal yang menekankan peran dan tugas Polri dalam kerja sama internasional dan pemeliharaan perdamaian dunia di bawah PBB. Misalnya, Pasal 15 ayat h menyebutkan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional, dan ayat j menyatakan peran Polri dalam mewakili pemerintah Indonesia di organisasi kepolisian internasional. Pasal 41 ayat 3 menjelaskan partisipasi aktif Polri dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah PBB, sedangkan Pasal 42 ayat 1 dan 3 membahas kerja sama dengan lembaga luar negeri dalam pencegahan kejahatan, baik dalam tugas operasional maupun kerja sama teknik, pendidikan, dan pelatihan, dengan dasar hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, dan memperhatikan hierarki.

Dihadapkan pada upaya meningkatkan peran Atpol di Belanda dalam mengatasi ancaman perang asimetris, maka diperlukan strategi yang tepat sesuai kebutuhan internal Atpol maupun tantangan ancaman yang semakin berkembang. Menurut Arthur F. Lykke, Jr. (1993) konsep kerangka strategi meliputi *ends, ways, dan means*. Bagi Lykke, strategi merupakan suatu ekspresi koheren dari suatu proses yang mengidentifikasikan *ends* (tujuan), *ways* (cara) dan *means* (sumber daya). *Ends* merupakan tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang dilakukan. Istilah *end-state* identik dengan akhir dari tujuan strategi. *Ways* adalah tindakan atau metode dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Means* adalah seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan metode dan proses tersebut. Lykke menyatakan pentingnya untuk menyeimbangkan *Ends, Ways, dan Means*, yang disamakannya dengan tiga pondasi dari strategi. Strategi disebut seimbang dan sedikit mengandung resiko jika dalam mencapai suatu tujuan (*Ends*) digunakan cara (*Ways*) yang tepat, dengan sumber daya (*Means*) yang memadai. Aplikasi strategi terhadap hasil penelitian ini maka kerangka strategi yang dapat dikembangkan oleh Atpol adalah sebagai berikut :

“Teratasinya ancaman perang asimetris dari negara Belanda (*ends*) melalui peningkatan peran Atpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai diplomat Kepolisian

Republik Indonesia (*ways*) menggunakan sarana pendekatan efektif pada pelaksanaan kontra propaganda, meningkatkan kemampuan Atpol RI di Belanda, meningkatkan kerjasama dengan atase instansi lain dalam mengatasi permasalahan bangsa, serta peningkatan pendekatan diplomasi dan peningkatan tupoksi Atpol di Belanda (*means*)”.

Kemudian dari strategi tersebut diuraikan secara teknis tentang sarana yang digunakan Atpol dalam mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan beberapa aspek sarana adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan efektif pada pelaksanaan kontra propaganda. Pendekatan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kontra propaganda dari kelompok pendukung separatisme di Belanda. Atase Polri kiranya dapat memiliki program kegiatan dan anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan kontra propaganda tersebut. Hal tersebut dapat dipenuhi dari ketersediaan regulasi bagi satuan Polri dalam melaksanakan kegiatan kontra propaganda. Dalam hal ini, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan WNI, WNA dan kelompok-kelompok mereka, yang mana tidak semua memiliki keinginan sepenuhnya untuk merdeka. Atpol dapat menggalang dan memberikan pemahaman yang baik kepada mereka melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung, baik melalui wadah diskusi, pertunjukan kesenian, undangan makan dan kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Selain itu peran media sosial yang juga sedikit banyak dapat memberikan masukan dan pemahaman yang baik, serta sebagai kontra opini terhadap segala bentuk isu, Hoax dan tebaran kebencian yang berkembang.

Sementara itu dalam penanggulangan Transnational Crime, Atpol harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak dan instansi guna mengantisipasi hal ini. Segala macam bentuk dialog, seminar, pertukaran informasi dan interaksi yang intens sangat dibutuhkan mengingat celah-celah Transnational Crime begitu luas di segala sisi kehidupan, sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang baik antar instansi yang ada. Selanjutnya, naluri intelijen yang baik harus selalu diasah terhadap segala bentuk kegagalan dan keanehan yang dapat menimbulkan aktivitas kejahatan lintas negara, sehingga diperlukan juga kemampuan cegah dini dan deteksi dini yang baik.

- b. Meningkatkan kemampuan Atpol RI di Belanda. Kemampuan yang perlu dikembangkan bagi Atase Polri dalam mengantisipasi perang asimetris adalah kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan penugasannya di LN. Kemampuan komunikasi ini menjadi penting karena dari komunikasi lah akan diperoleh informasi dan dibentuk jaringan yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas mencegah terjadinya perang asimetris. Komunikasi tidak terbatas pada aspek bahasa, namun lebih komprehensif dengan memberikan dukungan dengan perluasan wilayah penugasan dan akses informasi dalam sistem keamanan dan pertahanan baik di DN maupun LN. Kemampuan aspek komunikasi yang perlu ditingkatkan bagi Atase Polri untuk mengatasi ancaman perang asimetris antara lain:

- 1) *Public Speaking*, untuk menunjang kegiatan penggalangan kepada simpatisan kelompok separatis dan penjajakan kerja sama dengan lembaga penegak hukum setempat.
- 2) *Negosiasi*, untuk menunjang kegiatan diplomasi dalam menggiring kepentingan RI terhadap kelompok simpatisan separatis.
- 3) *Critical Thinking*, untuk menunjang kegiatan analisa dan deteksi dini potensi ancaman dari kelompok simpatisan separatis

- 4) *System Thinking*, untuk menunjang kegiatan analisa ketika menghubungkan sejumlah fakta-fakta untuk menarik suatu kesimpulan guna mendapatkan gambaran suatu kondisi yang lebih komprehensif.

Dalam lingkup Belanda, kemampuan tambahan yang perlu dimiliki oleh Atase Polri adalah (i) pengetahuan mengenai sejarah isu separatisme Maluku dan Papua; (ii) pengembangan jaringan untuk pendekatan kepada komunitas yang menjadi target propaganda kelompok pendukung separatisme; (iii) kemampuan pendekatan sosial budaya kepada kelompok-kelompok pendukung separatisme, dan (iv) pelaksanaan berbagai kegiatan di luar lingkup pengamanan untuk kontra upaya propaganda kelompok pendukung separatisme. Pendekatan yang efektif dalam mengatasi simpatisan kelompok separatis di Belanda antara lain dengan mengupayakan interaksi yang lebih intens dengan komunitas mereka, baik dengan menggunakan pendekatan budaya dan sosial. Kehadiran KBRI Den Haag dalam menghadirkan kegiatan budaya Maluku maupun Papua akan menumbuhkan ikatan yang lebih kuat dengan bangsa Indonesia, dimana mereka tidak dapat menyangkal bahwa jati diri mereka yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan akar kesukuan dan kekerabatan mereka yang saat ini masih ada di Indonesia. Interaksi yang intensif dengan mereka, saya nilai lambat laun akan merubah persepsi negatif mereka terhadap negara RI.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan atase instansi lain dalam mengatasi permasalahan bangsa. Keberadaan Atase Polri sangat dibutuhkan dalam mengatasi ancaman perang asimetris khususnya yang datang dari Kelompok RMS, OPM, dan ASNLF serta adanya *Transnational Crime* di Belanda. Oleh karena itu, Atase Polri harus memiliki koneksi dan jaringan yang luas dalam hal ini adalah pihak-pihak pengamanan negara setempat, maupun WNI dan warga negara setempat, sehingga dapat dengan cepat memperoleh informasi-informasi mengenai segala bentuk potensi ancaman yang ada. Selain itu, hal ini juga harus dibarengi dengan kemampuan penggalangan yang baik, guna memperluas jaring di lapangan, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, Atase Polri harus memiliki komunikasi yang aktif dengan pihak keimigrasian, Interpol, dan stakeholders terkait guna mengantisipasi segala bentuk ancaman kejahatan lintas negara yang berhubungan dengan WNI di Belanda.
- d. Peningkatan pendekatan diplomasi. Pendekatan terhadap kelompok separatis dapat dilakukan dengan soft diplomacy maupun hard diplomacy. *Soft diplomacy* dapat ditempuh jika kelompok separatis tersebut tidak melakukan tindakan yang ‘mengganggu’ kedaulatan RI secara terbuka. Kelompok ini lebih ingin menunjukkan jatidiri dan identitasnya serta mencoba memberikan ‘tekanan’ kepada Pemerintah di luar negeri. Untuk cara ini, pendekatan personal melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misal pasar malam atau festival Indonesia, dapat menjadi cara untuk ‘menekan’ atau mengirim pesan bahwa kemajemukan dihargai di Indonesia namun dalam kerangka NKRI. Adapun untuk hard diplomacy, strategi ini dapat dilakukan terhadap kelompok yang secara terbuka melakukan ‘serangan’ terhadap kedaulatan NKRI, misal melakukan posting di media sosial yang bersifat provokatif untuk mengajak simpatisannya mengganggu aktifitas perwakilan RI. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal (Belanda) akan sangat efektif untuk menghentikan/menghambat upaya-upaya kelompok kedua ini. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya:

- 1) Atpol melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian Diplomatik Den Haag untuk mengantisipasi setiap rencana peringatan hari jadi OPM, RMS dan ASNLF maupun kegiatan demonstrasi di depan kantor KBRI Den Haag ataupun aset-aset Indonesia lainnya di Belanda. Atpol bersama fungsi terkait pada KBRI Den Haag harus terus memonitor setiap perkembangan, selain itu juga Atpol dengan gerakan klandestien melakukan pendekatan melalui jejaring yang ada di dalam kelompok gerakan Papua Merdeka di Belanda agar mereka tidak melakukan Demo di depan KBRI dan mengganggu aset-aset Indonesia di Belanda.
- 2) Divhubinter Polri berkoordinasi dengan Baintelkam Polri dan Polda Papua untuk dapat diantisipasi himbauan aksi Global Flag Raising (GFR), namun disarankan agar dilaksanakan dengan bijaksana dengan menghindari upaya represif yang agresif supaya tidak menjadi isu baru yang dapat dibuat sebagai bahan oleh kelompok ini untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia.
- 3) Divhubinter Polri dapat berkoordinasi dengan Bareskrim Polri melalui Dittipidsiber untuk dapat men-takedown media sosial yang memposting himbauan akan aksi ini terutamanya laman facebook dari gerakan FWP : <https://www.facebook.com/freewestpapua/>.
- 4) Untuk penanggulangan TNC di Belanda, mekanisme kerjasama nyata yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerjasama penanganan TNC. Mekanisme tersebut dituangkan dalam MoU yang secara jelas menyebutkan person in *charge/national contact* dalam bidang kerjasama penanganan TNC.
- e. Peningkatan tupoksi Atpol di Belanda. Untuk meningkatkan peran Atase Polri dalam mengatasi ancaman perang asimetris oleh aktivis kelompok yang menyerang kedaulatan RI di Belanda, patut dipertimbangkan untuk mengembangkan penjabaran tugas pokok, fungsi, dan peran Atase Polri dalam upaya penanggulangan perang asimetris. Dengan demikian, Atase Polri nantinya dapat diproyeksikan untuk dapat melakukan kegiatan penggalangan terhadap kelompok-kelompok tersebut dengan tujuan merubah sikap dan pandangan politik agar mereka meninggalkan perjuangan untuk menentang kedaulatan RI di masa yang akan datang.

Selanjutnya, bilamana telah dilakukan pengembangan Tupoksi dan peran Atase Polri, maka Atase Polri perlu bekerja sama dengan Atase Pertahanan dan Fungsi Politik KBRI Den Haag dalam bersinergis menanggulangi ancaman perang asimetris yang dilakukan oleh ketiga kelompok simpatisan separatis tersebut. Dalam hal ini, Atase Polri tidak dapat bertindak sendiri sehubungan Fungsi Politik KBRI Den Haag merupakan leading sector yang menangani isu ancaman kedaulatan RI di Belanda. Atase Polri disarankan agar dapat berperang aktif menjadi penghubung (fasilitator) antara Bareskrim Polri dan aparat penegak hukum di Belanda untuk mewujudkan kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional, khususnya kejahatan peredaran Narkoba internasional dan terorisme. Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Peran Atase Polri di Belanda dalam Menghadapi Perang Asimetris

Negara Belanda merupakan salah satu negara penting bagi Indonesia, selain kedekatan sejarah, negara tersebut merupakan salah satu pusat pergaulan negara-negara internasional, dimana di negara tersebut terdapat organisasi-organisasi internasional seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*), Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), hal tersebut menjadikan Belanda sebagai negara penting pusat perhatian dunia Internasional. Menyadari pentingnya negara Belanda dalam hubungan internasional Indonesia, maka Pemerintah menempatkan perwakilan kedutaan besar sebagai lembaga penghubung diplomasi pemerintah yang ditempatkan di negara tersebut, salah satunya adalah Atase Polri dibawah Divhubinter-Polri. Atase Polri berperan sebagai perwakilan lembaga Polri di negara penempatan dalam mendukung penyelesaian tugas pokoknya. Kondisi saat ini peran Atpol Polri di Belanda dalam bidang pertahanan negara non-militer menghadapi berbagai ancaman dan tantangan diantaranya :

- a. Ancaman disintegrasi bangsa, dengan eksisnya kelompok-kelompok pro disintegrasi seperti Kelompok Aktivis Republik Maluku Selatan (RMS), Kelompok Aktivis *Free West Papua Campaign – Nederland (FWPC-N)*, dan Kelompok separatis Aceh Merdeka (*Acheh Sumatra National Liberation Front/ASNLF*) yang aktif melaksanakan pergerakan-pergerakan politik di negara Belanda. Kelompok-kelompok ini secara konsisten melaksanakan pergerakannya di Belanda dalam menyuarakan kepentingannya demi meraih dukungan masyarakat Internasional diantaranya dengan serangkaian Demonstrasi yang dilaksanakan pada hari-hari besar kelompok mereka. Kemudian pendekatan melalui kegiatan bersifat akademik dalam bidang HAM, indigenous, dan lingkungan, serta pameran terkait masa kolonial Belanda di sejumlah museum di Belanda. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya propaganda untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional mengenai eksistensinya sebagai entitas negara. Upaya diseminasi informasi mengenai syarat-syarat negara berdaulat dilakukan secara terencana di forum-forum internasional.
- b. Kejahatan internasional (*transnational crime*) dimana negara Belanda sebagai salah satu negara hub peredaran narkoba internasional. hal tersebut teridentifikasi dengan tertangkapnya beberapa pengedar narkoba di dalam negeri yang berasal dari jaringan peredaran narkoba dari Belanda.
- c. Ancaman terorisme, dengan telah terungkapnya beberapa WNI eks anggota Isis yang tinggal di Belanda. Situasi negara Belanda saat ini rawan terhadap serangan terorisme khususnya yang memiliki latar belakang agama (islam), dimana di negara tersebut terdapat kelompok-kelompok anti-islam yang didukung oleh beberapa senator Pemerintah Belanda. Beberapa kejadian seperti pembakaran Alquran, menjadi potensi tingginya ancaman terorisme di negara tersebut, Atpol dengan segala tanggung jawabnya harus mampu melindungi keselamatan WNI di Belanda baik dari ancaman serangan teror maupun ancaman penyebaran paham terorisme, selanjutnya aset-aset negara seperti Kedutaan Besar harus terlindung dari ancaman serangan teror.
- d. Ancaman *cyber* internasional, menjadi ancaman yang paling diwaspadai pada era perkembangan teknologi digital seperti saat ini, negara Belanda menjadi salah satu basis ancaman *cyber* bagi bangsa Indonesia, dimana telah terungkap beberapa ancaman di dalam negeri yang menyerang server milik Pemerintah maupun swasta dengan IP Adress berasal dari negara Belanda.

2. Strategi dan upaya dalam meningkatkan peran Atase Polri di Belanda saat ini dalam Menghadapi Ancaman Asimetris.

Dinamika ancaman asimetris yang datang dari negara Belanda semakin meningkat seiring dengan meningkatnya eskalasi perkembangan lingkungan strategis. Atpol sebagai salah satu alat negara dalam mengatasi ancaman asimetris perlu meningkatkan perannya, sehingga dapat mengatasi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional. Selain itu, peningkatan peran Atpol dapat meningkatkan kemampuan Pertahanan Negara di negara penugasan. Memperhatikan dinamika ancaman asimetris pada penugasan Atpol di Belanda periode tahun 2021-2024, maka untuk meningkatkan perannya, penting untuk menentukan strategi dan upaya yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan peran Atpol. Mengacu kepada kerangka strategi yang mengelaborasi *Ends*, *Ways*, dan *Means*, maka strategi yang diterapkan Atpol dalam meningkatkan perannya adalah “Teratasinya ancaman perang asimetris dari negara Belanda (*ends*) melalui peningkatan peran Atpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai diplomat Kepolisian Republik Indonesia (*ways*) menggunakan sarana pendekatan efektif pada pelaksanaan kontra propaganda, meningkatkan kemampuan Atpol RI di Belanda, meningkatkan kerjasama dengan atase instansi lain dalam mengatasi permasalahan bangsa, serta peningkatan pendekatan diplomasi dan peningkatan tupoksi Atpol di Belanda (*means*)”, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah :

- a. Meningkatkan pendekatan efektif pada pelaksanaan kontra propaganda. Dengan menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan WNI, WNA dan kelompok-kelompok separatis, yang mana tidak semua memiliki keinginan sepenuhnya untuk merdeka. Atpol dapat melaksanakan penggalangan dan pemberian pemahaman yang baik kepada mereka melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung, baik melalui wadah diskusi, pertunjukan kesenian, undangan makan dan kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Kemudian melaksanakan kontra opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok separatis di Media Sosial terhadap segala isu Hoax dan tebaran kebencian yang berkembang.

Dalam mengatasi ancaman Transnational Crime, Atpol meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas instansi baik antar instansi Atase maupun otoritas berwenang di Belanda. Kemudian meningkatkan naluri intelijen terhadap segala bentuk kejanggalan dan keanehan yang dapat menimbulkan aktivitas kejahatan lintas negara sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan cegah dini dan deteksi dini oleh Atpol.

- b. Meningkatkan kemampuan Atpol RI di Belanda. Salah satu aspek kemampuan yang perlu ditingkatkan selama ini dalam satuan Atpol diantaranya : Kemampuan Public Speaking, Kemampuan negosiasi, Kemampuan *Critical Thinking*, Kemampuan *System Thinking*.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan atase instansi lain dalam mengatasi permasalahan bangsa. Atpol harus memiliki komunikasi yang aktif dengan pihak Atase Pertahanan, keimigrasian, Interpol, dan stakeholders terkait guna mengantisipasi segala bentuk ancaman kejahatan lintas negara yang berhubungan dengan WNI di Belanda.
- d. Meningkatkan pendekatan diplomasi. Koordinasi intens dengan otoritas Belanda akan sangat efektif untuk menghentikan/menghambat upaya-upaya ancaman asimetris.
- e. Meningkatkan tupoksi Atpol di Belanda. Diantaranya Atpol diberi kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan penggalangan terhadap kelompok-kelompok separatis maupun teroris WNI dengan tujuan merubah sikap dan pandangan politik agar mereka menghilangkan niatnya untuk menentang kedaulatan RI dimasa yang akan datang.

REFERENSI

- Arifuddin Uksan. 2022. Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia, Suatu strategi kontra radikalisi dan Confidence-building measures. Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol. 8, No.3.
- Buzan, Barry, 'New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century'. (International Affairs, Vol.67 No.3, 1991).
- Bangun Manahan Laurensius. 2023. Peran Atase Pertahanan di Abuja Nigeria guna Menangkal Pergerakan Kelompok Separatis Papua. Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol. 9, No.2.
- Constantya Astrid Permata Sari. 2022. Penempatan Atase Pertahanan Indonesia di Fiji dalam Memperkuat Strategi Diplomasi Pertahanan di Kawasan Pasifik Selatan. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3 No. 5.
- Dugis, Vinsesnio. "Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik" (Surbaya : CSGS, 2016), hlm.6
- Gistyger Hasudungan Manullang, Muhamad Fauzi Abdul Rachman. 2023. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA). Jurnal Lemhanas RI, E-ISSN : 2830-5728.
- Kep Dansesko TNI Nomor KEP/502/IV/2020 tanggal 13 April tentang "Naskah Departemen tentang "Perang Asimetris" Bandung : Sesko TNI. Hlm.4
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.
- Wahyono. S.K, "Pengertian dan Lingkup keamanan Nasional" (KKSKN UI, 2003). Hlm 19